

Enam Proyek Pembangunan Drainase di Bontang Dikucur Lewat Bankeu, Ini Rinciannya



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 05/01/2026

BONTANG - Penanganan banjir masih menjadi perhatian serius Pemkot Bontang. Bahkan enam proyek pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir akan dikucur melalui bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Syahrudin mengatakan alokasi Bankeu di tahun ini mencapai Rp88,85 miliar. Nominal ini hanya 10 persen dari usulan yang diajukan sebelumnya.

“Kami mengajukan Rp880 miliar dan mendapatkan 10 persen dari angka tersebut. Ada enam kegiatan nantinya,” kata Syahrudin. Pembangunan saluran drainase di Kelurahan Gunung Telihan memperoleh Rp10,7 miliar. Menurutnya pengerjaan saluran drainase ini sangat penting supaya air dari hulu terbenjung dan tidak masuk ke permukiman warga. “Masih ada beberapa titik di Gunung Telihan yang belum tertangani saluran drainasenya. Tentunya bertahap,” ucapnya.

Kemudian pembangunan Polder Tanjung Laut juga masuk dalam pembiayaan Bankeu. Terdapat dua pagu untuk infrastruktur itu yakni Rp10,1 dan Rp7,52 miliar. Sebelumnya rencana Polder Tanjung Laut yang berlokasi di Jalan Selat Karimata berfungsi untuk menampung debit air dari saluran drainase primer di arah Jalan Jenderal Soedirman.

“Sebelumnya sudah ada upaya pengadaan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK),” tutur dia. Berdasarkan informasi sebelumnya, pagu anggaran untuk pembangunan Polder Tanjung Laut dibutuhkan Rp43 miliar. Selanjutnya infrastruktur yang disuplai dari Bankeu yaitu pembangunan saluran drainase primer di Api-Api. Totalnya mencapai Rp20 miliar. “DAS Bontang masih membutuhkan penanganan karena belum seluruhnya terturap,” terangnya. Terakhir, dua

proyek yang didanai Bankeu yakni pembangunan saluran drainase primer di Kelurahan Guntung. Proyek ini terbagi dalam dua segmen. Nominalnya yakni Rp15 dan Rp25 miliar. “Pada intinya penanganan banjir masih menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Enam Proyek Pembangunan Drainase di Bontang Dikucur Lewat Bankeu, Ini Rinciannya, 05/01/2026

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.